P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

MONOPOLI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Enzus Tinianus, Roslaini Ramli, Nurdin MH, Suhaimi, Abdurrahman

*Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Syiah Kuala
Jln. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh, 23111
enzustinianus@unsyiah.ac.id*

Abstract

Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.

Keywords: *Monopoly, Business Competition, Information Technology*

Abstrak

Persaingan dalam dunia usaha mengakibatkan pelaku usaha kadang-kadang menempuh berbagai cara guna melakukan persaingan usaha secara tidak sehat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Dalam dunia maya (teknologi informasi misalnya) tindakan ini banyak dijumpai. Sehingga perlu dilakukan pengkajian bagaimana larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap usaha di bidang teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang data utamanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli pasar dalam hukum teknologi informasi dapat berupa *vertical integration*, diskriminasi pelaku usaha, pengambilan nama domain, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan pesaing usaha. Tindakan *tying arrangement* dalam kasus Microsoft merupakan bentuk

persaingan usaha tidak sehat, dimana perusahaan *software* raksasa Microsoft dituduh melakukan pelanggaran terhadap *antitrust law* dengan melakukan tindakan *Tying Arrangement* dengan mengaitkan pada produk *windows (the tying product)* dengan produk *browser internet explorer (the tied product)*. *Tying Arrangement* tersebut diduga dilakukan dalam rangka ingin memenangkan monopoli dalam pasar produk *browser* dalam internet.

Kata kunci: Monopoli, Persaingan Usaha, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai etis dalam budaya masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam keberagaman agama, suku/etnis dan bahasa. Oleh karena itu secara umum kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi keseimbangan, keharmonisan dan kegotong-royongan. Pemahaman terhadap prinsip bersaing atau berkompetisi tidak begitu saja akan diterima, karena masyarakat Indonesia yang selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan tentunya tidak terbiasa hidup dengan nilai-nilai persaingan tersebut. Namun ini bukan berarti dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berslogan “*Bhinneka Tunggal Ika*” sama sekali tidak mengenal kompetisi atau persaingan. Kompetisi itu tetap ada dan tidak mungkin dihilangkan, karena dengan kompetisi itulah tatanan masyarakat terus berkembang menuju ke arah yang lebih modern.

Dalam dunia usaha, “setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. Kondisi itu memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja dan daya saing, tentu melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya. Sebagai konsekuensi keberhasilan mencapai hal itu, pelaku usaha akan memperoleh posisi dominan atau memiliki market power (kekuatan pasar) di suatu pasar tertentu”.¹

Dengan demikian, “dalam suatu kegiatan usaha, pelaku usaha wajar jika bersaing dengan pelaku usaha lainnya, namun harus tetap mengindahkan rambu-rambu hukum yang mengatur persaingan tersebut. Suatu hal yang dapat dimengerti pula, bahwa dalam diri setiap pelaku usaha itu melekat naluri bisnis yang berkiblat pada ‘profit oriented’, serta keinginan untuk memperluas pangsa pasarnya, sehingga salah satu strategi bisnis yang mereka lakukan adalah masalah strategi berupa keinginan untuk mengatasi masalah persaingan”.² Namun demikian, “tidak dapat dipungkiri fenomena terjadinya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Keadaan dimaksud sudah pernah melanda Negara Republik Indonesia sejak era Orde Baru”.³

Sebenarnya, jika diamati perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam berbagai kegiatan, kita akan menemukan berbagai bentuk persaingan yang sangat berperan dalam meningkatkan prestasi dan hasil yang dicapai. Jika tidak adanya persaingan dalam menjalankan usaha, tidak akan diketahui apakah kinerjanya dalam berusaha sudah maksimal atau optimal. Tanpa adanya pesaing sebagai pembanding, pelaku usaha akan terjebak pada penilaian secara subjektif bahwa dia lah yang terbaik, yang paling sempurna dan tidak adaandingannya. Dengan adanya pesaing, para pelaku usaha akan dapat membandingkan atau mengukur kinerjanya dengan pelaku usaha yang lainnya.

¹ Putri Regina dan Muskibah. 2020. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Jurnal ZAAKEN*. Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 2

² Marwanto dan I Nyoman Mudana. 2018. “Pola Pengaturan Lembaga Kepailitan Dalam Upaya Mengantisipasi Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bahan Kuliah”, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. hlm 2. <https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=Kompetisi+dalam+berusaha/>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

³ *Ibid.*

Persoalan persaingan dalam dunia usaha tidaklah semudah seperti yang berkembang dalam kegiatan lain (non usaha) sebagaimana dalam kegiatan lainnya. Persaingan dalam dunia usaha kadang-kadang menempuh berbagai cara yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha di antara sesama pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya karena hal tersebut dilakukan secara tidak jujur. Para pelaku usaha mempengaruhi struktur pasar, harga bahkan dengan segala cara menyingkirkan para pesaingnya yang kadang-kadang justru sudah merupakan tindak kriminal.

Adapun faktor “penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yaitu untuk menentukan atau membuat suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha itu sendiri. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada akhirnya akan merugikan pelaku usaha lainnya”.⁴

Tindakan persaingan usaha tidak sehat bukan hanya terjadi dalam kegiatan usaha yang konvensional, dalam dunia maya pun (teknologi informasi misalnya) tindakan ini banyak dijumpai. Suatu perusahaan yang memproduksi software tertentu dapat memproduksi produknya secara terpisah. Selanjutnya konsumen dengan cara tidak langsung dipaksa untuk membeli produk kedua dengan tidak ada pilihan untuk dapat beralih atau menggantikannya dengan produk perusahaan lain. Tindakan sebaliknya dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa software dalam satu produk, padahal belum tentu konsumen membutuhkannya. Seperti misalnya “suatu perangkat lunak untuk membagi atau menggabungkan file pdf. Dengan bantuan perangkat lunak tersebut, dokumen pdf dapat dibagi menjadi beberapa mode: membagi halaman, pilih dan isolasi sekelompok halaman, pilih interval tertentu untuk segmentasi, atau pilih halaman tertentu. Di samping itu dapat juga menggabungkan beberapa file pdf dengan bantuan perangkat lunak tersebut. *Icecream pdfSplit* dan *Merge Pro*, bersama dengan antarmuka yang cantik dan nyaman, memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan *file pdf* terenkripsi dan melihat dokumen”.⁵ Padahal tidak semua konsumen membutuhkannya, akan tetapi karena sudah digabungkan tidak ada pilihan lain bagi konsumen untuk membelinya.

Pengaturan persaingan usaha terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)”. Persaingan curang lainnya yang dapat ditemukan dalam persaingan usaha dalam bidang teknologi informasi adalah penyalahgunaan nama domain, kasus www.mustikaratu.com merupakan salah satu diantaranya. Di pasaran ditemukan beberapa domain yang berkaitan dengan Mustika Ratu, seperti: “www.mustikaratu.com”, “www.mustikaratu.net”, dan “www.mustikaratu.org”. Walaupun nama domain dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu perusahaan penghasil jamu, namun ternyata dalam pemeriksaan di pengadilan tidak menggunakan kaedah hukum teknologi informasi, karena kita memang belum memilikinya.

Adapun latar belakang kasus Mustika Ratu dapat dikemukakan sebagai berikut: “Bahwa sejak Tahun 1970-an, Martha Tilaar dan Mooryati Soedibyo adalah teman atau sahabat karib. Secara bersama-sama mereka secara rukun bekerja keras dan berupaya supaya jamu dan kosmetika Indonesia

⁴Ardos Rewindo Sirait. “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia”. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=persaingan+usaha+tidak+sehat>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

⁵<https://www.tokopedia.com/aplikasion/new-produk-program-software-mengga-bungkan-memisahkan-pdf-merge-dan>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

yang diolah secara tradisional dari bahan-bahan alami dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Pada mulanya, mereka bersepakat menjalankan usahanya dengan menggunakan 1 (satu) merek yaitu Mustika Ratu. Kemudian dalam perkembangannya, yaitu pada tanggal 7 Februari 1977 mereka berdua bersepakat untuk berpisah dan dilakukan secara baik-baik. Untuk merek Mustika Ratu tetap dipegang oleh Mooryati Soedibyo, sedangkan rekannya Martha Tilaar mendirikan perusahaan yang namanya Martina Berto dengan merek dagangnya Sari Ayu. Ternyata belakangan timbul persaingan di antara mereka berdua dan hubungan mereka mulai retak, karena Mustika Ratu yang mengeluarkan produknya dengan nama Mustika Ratu dan Martina Berto menggunakan nama Sari Ayu, kedua-duanya memiliki produk dan segmen yang persis sama. Bahkan, beberapa produk diproduksi secara berbarengan dengan maksud menyaingi produk yang lainnya. Ketika itu Manajer Internasional Marketing yang bernama Chandra Sugiono yang pada awal mulanya sekitar bulan September 1999 bergabung ke perusahaan Martina Berto, secara berani melakukan suatu tindakan yang cukup fatal di kemudian hari. Dalam hal ini Chandra Sugiono mendaftarkan nama domain Mustika-Ratu.com pada tanggal 7 Oktober 1999 sebagai merek yang ternyata sudah dipergunakan sebelumnya oleh Mooryati Soedibyo sebagai seateru Martina Berto. Kemudian pada tanggal 4 September 2000 Mooryati Soedibyo (Mustika Ratu) melaporkan Martina Berto ke Mabes Polri”.⁶

Dengan demikian menarik kiranya hal tersebut diteliti dan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Dalam hal ini juga akan dianalisis kasus tertentu yang ada relevansinya dengan topik kajian penelitian ini :

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk monopoli pasar dan persaingan usaha tidak sehat ?
- b. Bagaimanakah larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap usaha di bidang teknologi informasi?
- c. Bagaimanakah analisis kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

METODOLOGI PENELITIAN

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data primernya diperoleh melalui penelitian kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Sehingga metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai penelitian hukum normatif, “maka teknik pengumpulan datanya adalah berupa data kepustakaan, seperti buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, website dan bahan-bahan lain yang diperoleh melalui jaringan internet. Selanjutnya terhadap data yang diperoleh tersebut, dianalisis secara kualitatif dan dikemukakan secara preskriptif”.⁷

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Monopoli Pasar dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut “Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau

⁶Mohan Rifqo Virhani. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain Di Internet”. <https://media.neliti.com/media/publications/233761-analisis-perlindungan-hukum-terhadap-nama-270a1eb6.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021.

⁷Suhaimi, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia”. *Jurnal Ius Civile*. Vol. 5 No. 1, 2021, .hlm. 80.

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa persaingan usaha tidak sehat itu terjadi antar pelaku usaha dan tidak mungkin terjadi antara produsen dengan konsumen. Hal ini dapat dipahami bahwa konsumen tidak mungkin melakukan persaingan dengan pelaku usaha barang atau jasa dimaksud, mengingat dia hanya mengkonsumsi atau menerima pelayanan saja. Selain itu, suatu persaingan usaha baru dikatakan tidak sehat jika persaingan itu dilakukan secara tidak etis secara melawan hukum, karena hal tersebut dilakukan secara tidak jujur atau dengan cara menghambat terjadinya persaingan usaha secara sehat dan secara wajar.

Adapun mengenai “bentuk persaingan usaha yang tidak sehat diatur dalam Bab III dan Bab IV UU No. 5 Tahun 1999. Dalam Bab III disebutkan tentang perjanjian yang dilarang, yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian tertutup. Selanjutnya Bab IV mengatur tentang kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan”.⁸

Adanya iklim persaingan usaha yang sehat sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan dunia usaha. Ini merupakan syarat mutlak agar bangunan perekonomian secara keseluruhan tetap sehat dan terus tumbuh untuk meningkatkan kesejahteraan. “Persaingan usaha tidak sehat sering disebut sebagai persaingan usaha secara negatif, sehingga mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dimana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tertentu saja. Sementara itu, monopoli bagi pelaku usaha adalah suatu struktur pasar yang dikuasai oleh satu produsen atau penjual tertentu. Sementara itu monopoli bagi masyarakat awam dapat dikatakan hanya ada satu produsen tertentu atau penjual yang mempunyai kekuatan menguasai pasar dengan produknya. Dalam hal ini produsen tersebut mempunyai kemampuan dalam menguasai pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang diperdagangkannya. Dengan demikian, monopoli merupakan suatu keadaan dalam masyarakat yang memiliki ciri-ciri : (1) Di pasaran hanya ada satu produsen atau penjual untuk barang atau jasa tertentu, (2) tidak ada produsen atau penjual yang lain yang menghasilkan produk yang sama sehingga dapat menggantikan produk yang dihasilkan pelaku usaha yang melakukan monopoli tersebut, (3) Ditemukannya suatu hambatan baik hambatan alamiah, teknis atau hukum”.⁹

Persaingan usaha tidak sehat “juga mempengaruhi perlindungan konsumen, dimana dampak dari persaingan usaha tidak sehat akan dirasakan oleh konsumen (baik secara langsung maupun tidak langsung). Beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara eksplisit menyebutkan konsumen dan/atau pembeli untuk mempertegas perlindungan konsumen dari dampak persaingan usaha tidak sehat. Misalnya perilaku Kartel, dampaknya akan mengurangi kesejahteraan konsumen melalui harga yang mahal alias tidak kompetitif”.¹⁰

Selanjutnya “kartel merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis atau bisa juga secara tidak tertulis antara pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan suatu produksi barang tertentu, atau mengendalikan pemasaran barang atau jasa tertentu. Akibatnya akan dicapai suatu harga tertinggi, sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan keuntungan bagi pelaku usaha

⁸Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telekomunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003). hlm. 577-578.

⁹Muliyawan. 2015. “Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B”. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>, Diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

¹⁰Hukum Online.com. 2019. Ada Irisan Kuat Antara Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c93402f7d670/ada-irisan-kuat-antara-persai-ngan-usaha-dan-perlindungan-konsumen/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

tersebut. Sehingga kartel merupakan suatu praktek persaingan usaha di kalangan pengusaha yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di beberapa negara di dalam Undang-Undang Monopoli diatur secara tegas tentang larangan kartel tersebut, karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik”.¹¹

Mengingat dampak yang begitu besar dari persaingan usaha yang tidak sehat, maka sangat dirasakan kebutuhan akan adanya peraturan yang dapat mengganjar dan membuat jera pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan persaingan secara tidak sehat. Karenanya banyak negara telah mengadopsi suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha. Istilah yang digunakan cukup beragam, Amerika Serikat yang modelnya banyak diikuti oleh negara lain dikenal dengan istilah *Antitrust Act*, atau Australia dengan *Fair Trade Practices Act*. Termasuk juga Indonesia yang juga mengatur masalah persaingan usaha di dalam “UU No. 5 Tahun 1999”. Selanjutnya jugadiatur tentang tindakan apa yang dapat dikenakan dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha, serta sanksi baik administratif, pidana dan perdata.

Walaupun ada anggapan karena didesak oleh IMF, Indonesia telah mengatur persoalan persaingan usaha ini dalam “UU No. 5 Tahun 1999” yang efektif berlaku pada bulan Maret tahun 2000, akan tetapi dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan akan terjadi perubahan struktur pasar. Ada beberapa kemungkinan yang mempengaruhi para pelaku usaha, seperti misalnya akan bertahan dibidang usaha tersebut, keluar dari kompetisi (kalah), perubahan atau beralihnya sektor usaha, atau konsentrasi usaha.

Diberlakukannya undang-undang tentang persaingan usaha ini dianggap sebagaialternatif jawaban yang dapat menjadi aturan main bagi pelaku usaha. Walaupun dalam peraturan perundangan lainnya juga ada sekilas mengatur masalah persaingan usaha tidak sehat, sesuai dengan kekhususan undang-undang tersebut, seperti: “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

Sehubungan dengan persaingan usaha tidak sehat, berikut dikemukakan beberapa perjanjian yang dilarang, sebagai berikut:

a. Oligopoli

Oligopoli dapat terjadi dengan “*implicit verbal negotiation*, misalnya ketika setiap pelaku usaha melaksanakan komperensi persaingan usaha tidak sehat untuk mengumumkan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan usahanya seperti penawaran dan permintaan, keuntungan, rencana output dan harga produknya. Semakin rinci pengumumannya akan semakin mungkin terjadi *implicit verbal agreement* diantara palaku usaha”.¹² Bila setiap pelaku usaha mengadakan komperensi persaingan usaha tidak sehat secaraterus menerus dan berurutan, maka akhirnya mereka akan sampai kepada harga yang identik. Secara tidak langsung mereka telah melakukan negosiasi perjanjian biasa. Oligopoli dapat juga terjadi dimana para pelaku usaha saling bergantung dengan mengikuti pemimpin harga.

Apayang diatur dalam “Pasal 4 UU No.5 Tahun 1999” tidak jelas, “karena menurut undang-undang tersebut perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan, jadi bukan per se illegal. Persoalan prosentase 75 % menguasai pangsa pasar juga menjadi permasalahan

¹¹Muliyawan, *Op. Cit.*

¹²Areed, Phillip dan Kaplow, Louis. “*Anti Trust, Problem, Text, Cases*”. (Boston: Little Brown and Company. 1988), pp. 225.

tersendiri. Dalam hukum persaingan usaha *per se illegal* telah lama diterapkan, yaitu usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli”.¹³

b. Penetapan harga

“Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pesaing-pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang atau jasa bagi konsumen atau pelanggannya”. Jadi “seharusnya para pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut bersaing satu sama lain didalam harga, tetapi karena adanya perjanjian tersebut maka tidak ada lagi persaingan diantara mereka. Ada dua bentuk penetapan harga, yaitu penetapan harga horizontal (*price fixing*) dan penetapan harga vertikal (*resale price maintenance*). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengkatagorikan *price fixing* sebagai *per se illegal* sedangkan *resale price fixing* bukan sebagai *per se illegal*”.¹⁴

c. Perjanjian Pembagian Wilayah (*Market Allocation*)

Cara lain untuk mengontrol harga walaupun secara tidak langsung adalah perjanjian diantara para pelaku usaha untuk tidak saling berkompetisi di antara satu sama lainnya yaitu dengan membagi wilayah pemasaran baik secara geografis, jenis atau kelas konsumen, atau berdasarkan jenis produk yang dikeluarkan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat dipahami bahwa perjanjian pembagian wilayah bukan *per se illegal*, artinya hanya dilarang bila dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau monopoli.

d. Kartel

Kartel dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh sebuah pelaku usaha dengan pelaku usaha saingannya untuk mempengaruhi penentuan harga, termasuk juga produksi yang seharusnya mempunyai kebijakan independen. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa unsur harga dan produk sangat penting. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 larangan kartel hanya berlaku jika dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli.

e. Pemboikotan

“Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999” mengatur bahwa “pemboikotan termasuk sebagai *per se illegal*”. Dalam praktek, pemboikotan dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian diantara para pesaing untuk tidak berhubungan dengan pesaing tertentu atau dapat juga dengan memaksa *supplier* atau pelanggannya untuk tidak melakukan hubungan bisnis dengan para pesaing lainnya.

Selain yang telah dijelaskan diatas, “UU No. 5 Tahun 1999 juga melarang perjanjian yang bersifat tertutup, integrasi vertikal, oligopsoni dan trust”. Selain perjanjian yang dilarang, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang, yaitu:

a. Monopoli

Menurut “Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Berdasarkan Pasal 17 tersebut, unsur-unsur yang harus dibuktikan dari suatu praktik monopoli adalah: “(a). Adanya perjanjian di antara pelaku usaha; (b). Mengatur jumlah

¹³Ranyta Yusran. 2010. “Pentingnya prinsip “per se” dan “rule of reason” di UU Persaingan Usaha”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

¹⁴*Ibid.* hlm. 89.

produksi; (c). Mengatur pemasaran suatu barang dan/atau jasa; (d). Bermaksud untuk mempengaruhi harga; (e). Dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; (f). 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.¹⁵

Untuk membuktikan hal-hal diatas maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :“(1) Produk tersebut belum ada substitusinya; (2) Pelaku usaha lain sulit masuk kedalam pasar persaingan terhadap produk yang sama tinggi; (3) Pelaku usaha yang lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan; dan (4) Satu atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar dari satu jenis produk”.¹⁶

b. Monopsoni

Larangan kegiatan ini terdapat dalam “Pasal 18UU No.5 Tahun 1999”. Dalam hal ini “monopsoni dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana suatu kelompok usahamenguasai suatu pasar yang besar untuk membeli suatu produk. Sehingga adanya pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat apalagi bila mereka telah menguasai 50 % pangsa pasar”.

2. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha di Bidang Teknologi Informasi

Menurut matrik yang dibuat oleh Ahmad M. Ramli, ada beberapa keterkaitan antara “UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan HukumTeknologi Informasi”, yaitu :¹⁷

a. Monopoli

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa monopoli menurut “Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 1999” tidak hanya penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu, monopoli dapat juga terjadi dalam teknologi informasi, misalnya mengidentifikasi produk *software* dengan *hardware* seperti dalam kasus Napster, US Vs Microsoft.

b. Persaingan usaha tidak sehat

Dalam bidang teknologi informasi, dapat juga terjadi persaingan usaha tidak sehat, yaitu berupa perbuatan *passing off* menyangkut penggunaan merek sebagai nama domain tanpa izin pemilik merek tersebut.

c. Posisi dominan

“Pasal 25 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999” menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; ataumembatasi pasar dan pengembangan teknologi; ataumenghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk

¹⁵Gresnews.com. 2016. “Hukum dan Praktik Monopoli dalam Persaingan Usaha”. <https://www.gresnews.com/berita/tips/107859-hukum-dan-praktik-monopoli-dalam-persaingan-usaha/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

¹⁶Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁷Ahmad M. Ramli. “*CyberLaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*”. (Bandung: Refika Utama. 2004), hlm. 68-70.

memasuki pasar bersangkutan”. Dalam usaha di bidang teknologi informasi, upaya membatasi pasar, pengembangan teknologi dan akses terhadap pelaku usaha lain sangat mungkin dilakukan oleh media informasi misalnya melalui *carapassing off*, *cyber squatter*, *typo sitedan* lain-lain.

d. Alat bukti

Alat bukti dalam “Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999” yang akan digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat berupa : “Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat dan/atau dokumen; Petunjuk; dan Keterangan pelaku usaha”.

Dalam rangka penegakan hukum teknologi informasi, perlu ditegaskan bahwa alat bukti berupa dokumen mencakup data dan/atau dokumen elektronik.

e. Perjanjian yang berkaitan dengan HKI

Sehubungan dengan HKI, “Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999” menyebutkan bahwa “yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”. Kekecualian ini harus dibatasi dengan tidak mencampur-adukkan produk HKI dalam bentuk *software* dengan HKI dalam bentuk *hardware* dalam produksi dan pemasarannya seperti dalam kasus netscape. Dalam hal ini “*search engine Netscape* kalah bersaing dibandingkan *Google*”.¹⁸

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka semua potensi tindakan untuk memonopoli pasar dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam kondisi nyata (konvensional) dapat terjadi dalam bidang teknologi informasi, di antaranya adalah :¹⁹

- 1) “Vertical Integration yang dilakukan oleh para pihak, ini adalah bentuk merger, dimana pihak yang menyelenggarakan sistem ternyata sebenarnya adalah pelaku usaha yang berada dalam satu kelompok saja;
- 2) Keberadaan B2b²⁰ market place yang mungkin akan mendiskriminasi para pelaku usaha, karena sangat tergantung kepada kewenangan sistem yang diselenggarakan oleh market provider;
- 3) Pengambilan nama domain oleh kompetitor, yang berindikasi kepada penggunaan ataupun penguasaan suatu merek oleh kompetitor”.

1. Analisis Kasus Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Salah satu kasus yang dianalisis di sini adalah kasus *Tying Arrangement* dalam kasus *Microsoft*, karena kasus ini merupakan salah satu kasus yang berkaitan dengan “UU No. 5 Tahun 1999”.

Tying Arrangement atau dapat juga dipakai istilah perjanjian yang mengikat (*tie-in*), yaitu suatu penjualan dari suatu produk (*the “tying” product*) dengan menciptakan suatu kondisi konsumen harus mengambil produk kedua (*the “tied” product*). Jadi dibawah *Tying Arrangement*, sipenjual dari

¹⁸JawaPos.com. 2019. “Inovasi Belum Maksimal (Bambang Minta Peneliti Belajar dari Kasus *Google ‘Versus’ Netscape*”. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/03/2019/bambang-minta-peneliti-belajar-dari-kasus-google-versus-netscape/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

¹⁹Edmon Makarim. *Op-Cit*. hlm. 579.

²⁰Detikfinance. 2019. “Marketplace B2b merupakan sebuah *platform marketplace business-to-business* pertama di Indonesia yang dinamakan Mbizmarket”. Lihat Berita Ekonomi Bisnis, detikfinance, “Marketplace B2B Jadi Solusi Tepat Kembangkan Bisnis Berbagai Skala”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4529961/marketplace-b2b-jadi-solusi-tepat-kembangkan-bisnis-berbagai-skala>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

suatu produk mengkondisikan penjualan produknya dengan kesepakatan dari sipembeli juga ikut membeli produk kedua.²¹

Tidak semua *Tying Arrangement* adalah ilegal atau dilarang oleh hukum, dan untuk membedakan mana yang dilarang dan tidak adalah hal yang sangat sulit. Pendekatan yang digunakan adalah melalui “*per se*” rule, yaitu bila memenuhi kriteria tertentu :

“Ada 2 jenis produk berbeda”;

- a. “penjual mensyaratkan atau mengkondisikan pembeli untuk membeli produk kedua (*the tied product*) dalam rangka mendapatkan produk pertama (*the tying product*);
- b. penjual memiliki kekuatan di pasar produk pertama;
- c. tindakan *Tying Arrangement* yang dilakukan itu mengakibatkan pengaruh substansial terhadap produk kedua”.²²

Tindakan *Tying Arrangement* sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan konsumen, karena dengan tindakan ini sebenarnya membuat konsumen merasa terpaksa untuk membeli produk tersebut yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Selain itu kemungkinan besar suatu produk akan lebih besar biayanya bila dijual secara terpisah yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Dalam hukum persaingan tindakan *Tying Arrangement* dilarang karena kemungkinan si pelaku usaha akan mendapat profit dua kali dari hasil monopolinya pada produk yang pertama atau tindakan ini dimaksud sebagai pembatasan vertikal. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki posisi dominan di pasar sehingga tidak memiliki kekuatan pasar sangat mustahil untuk melakukan tindakan *Tying Arrangement*, karena bila tidak memiliki kekuatan pasar maka tindakan itu akan sia-sia. Sia-sia karena konsumen akan mencari alternatif lain bila ia tidak setuju dengan pemaksaan membeli produk yang kedua.

Dalam “UU No.5 Tahun 1999”, pengaturan tentang *Tying Arrangement* dapat ditemukan dalam “Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 huruf b, dan juga Pasal 25 ayat (1) huruf a”. Jika pada Pasal 15 ayat (2) ketentuan *Tying Arrangement* atau perjanjian yang terikat diberikan melalui pendekatan *per se*, maka Pasal 19 huruf b dan pasal 25 ayat (1) huruf a pengaturan *Tying Arrangement* diberikan secara implisit atau dengan menggunakan *rule of reason*.

Selanjutnya pada “Pasal 15 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999” dikatakan bahwa : “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”. Memang ketentuan pada “Pasal 15 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999” tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian terikat atau *Tying Arrangement*. Hanya dikatakan bahwa apabila suatu pembelian barang atau jasa “bergantung” pada pembelian barang atau jasa lainnya, maka langsung dapat dikategorikan perjanjian yang mengikat menurut Pasal 15 ayat (2) tersebut. Jadi tidak perlu lebih dulu melihat apakah ada keterkaitan secara materi dan isi antara perjanjian-perjanjian mengikat tersebut.

Dalam “Pasal 19 huruf b UU No.5 Tahun 1999”, disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lainnya, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.* hlm. 580.

usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu”. Hal ini dimaksudkan bahwa perjanjian yang menghalangi kebebasan konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang menguntungkan mereka adalah dilarang. Pada tying arrangement, jelas terlihat bahwa hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa dibatasi dengan adanya persyaratan dari pelaku usaha untuk mau tidak mau membeli barang dan/atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan mereka. Perjanjian yang menghalangi kebebasan konsumen untuk memilih ini dianggap sebagai usaha dari pelaku usaha untuk memegang monopoli dari penjualan suatu barang dan/atau jasa dengan cara yang curang.

Sementara itu pada “Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1999” disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan persyaratan-persyaratan dengan tujuan mencegah dan/atau menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas”. Dalam pasal ini, posisi dominan merupakan suatu syarat untuk dilarang Tying Arrangement. Tanpa adanya posisi dominan, Tying Arrangement tidak dilarang dan tidak akan berarti apa-apa. Penentuan posisi dominan dengan memakai batas pangsa pasar disini menggunakan pendekatan per se. Pendekatan per se dalam kaitannya dengan posisi dominan ini dapat dilihat melalui ketentuan yang ada pada “Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” ini yang menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan, apabila pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah menguasai sekitar 50 % atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu, atau dua atau tiga pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah menguasai 75 % atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

Dengan melihat Pasal 25 ayat (2) tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika pelaku usaha telah mencapai batas penguasaan pangsa pasar tertentu atau bahkan melebihi batas tertentu, maka tanpa harus dibuktikan lebih dahulu pelaku usaha tersebut langsung dapat dikatakan telah berada dalam posisi dominan.

Ketentuan “Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999” mengecualikan dari berlakunya semua ketentuan beberapa perjanjian, yaitu perjanjian untuk benar-benar akan melaksanakan peraturan perundang-undangan, perjanjian lain yang berhubungan dengan HKI, standar teknis, keagenan, penelitian, perjanjian internasional serta perjanjian ekspor. Contoh hal ini dapat kita temukan dalam perjanjian waralaba.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu mempelajari bagaimana pengalaman yang dipraktekkan di negara-negara lain dalam rangka menangani kasus-kasus hukum persaingan di negara mereka masing-masing. Tentunya para penegak hukum persaingan di Indonesia tidak perlu meniru persis cara-cara yang dilakukan negara lain, tetapi dengan cara bijaksana harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kasus *Microsoft* yang terjadi di era persaingan modern merupakan kasus yang menarik, alasannya selain kasus ini ditangani di Amerika sebagai pelopor hukum persaingan juga karena kasus ini menyangkut teknologi terbaru yang sepertinya usaha tidak sehat sulit untuk dijangkau oleh hukum. Dengan kasus ini maka hukum anti persaingan usaha tidak sehat ditantang untuk tidak ketinggalan teknologi.

Dalam kasus *Microsoft* terlihat bahwa *Department of Justice* (DOJ) menerima laporan pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh *Microsoft*, yaitu *Netscape*, lalu menggugat *Microsoft* di pengadilan Amerika Serikat. Fungsi DOJ ini dapat digantikan oleh *Federal Trade Commission* (FTC) yang mirip dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia sebagaimana terdapat di dalam “Pasal 35 dan 47 UU No. 5 Tahun 1999”. Keduanya dapat menerima pengaduan adanya kasus persaingan usaha.

Menurut “UU No. 5 Tahun 1999”, apabila adanya dugaan telah terjadinya suatu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, maka masyarakat dan atau pelaku usaha lainnya dapat melaporkan hal tersebut kepada KPPU. Dalam hal ini KPPU dapat menerima laporan tersebut yang kemudian dapat memanggil saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, menyimpulkan hasil penyidikan dan penyelidikan, memanggil pelaku usaha, termasuk meminta informasi atau keterangan dari instansi pemerintah, serta mendapatkan dokumen atau alat-alat bukti,. Terakhir KPPU juga dapat memutuskan apakah benar pelaku usaha tersebut melakukan persaingan usaha tidak sehat dan selanjutnya menjatuhkan sanksi administratif. Akan tetapi perbedaannya KPPU di Indonesia dengan FTC di Amerika Serikat adalah FTC memiliki kewenangan untuk memasukkan gugatan perdata ke pengadilan. Perbedaan lain adalah KPPU di Indonesia justru dapat menjatuhkan sanksi pidana.

Pada kasus *Microsoft* dimana perusahaan *software* raksasa *Microsoft* dituduh melakukan pelanggaran terhadap *antitrust law* dengan melakukan tindakan *Tying Arrangement* dengan mengaitkan pada produk *windows (the tying product)* dengan produk *browser internet explorer (the tied product)*. *Tying Arrangement* tersebut diduga dilakukan dalam rangka ingin memenangkan monopoli juga dalam pasar produk browser dalam internet. Teori-teori hukum persaingan yang digunakan dalam kasus ini membuktikan bahwa selain kondisi-kondisi yang disyaratkan untuk terjadinya *Tying Arrangement* secara *per se* oleh undang-undang, masih ada lagi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan.

Dalam kasus tersebut yang menjadi perhatian hak kebebasan konsumen untuk memilih jelas terganggu dengan adanya tindakan *Tying Arrangement* ini, serta definisi yang menentukan dua jenis produk yang berbeda sebagai dua produk yang terpisah satu sama lain (*separated produk*) atau merupakan satu kesatuan produk

PENUTUP

Persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli terjadi antar pelaku usaha dan tidak mungkin terjadi antara produsen dengan konsumen, karena persaingan usaha dilakukan antar pelaku usaha. Suatu persaingan usaha baru dikatakan tidak sehat apabila persaingan itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau dengan cara menghambat terjadinya persaingan usaha. Bentuk persaingan usaha yang tidak sehat menurut “UU No.5 Tahun 1999” disebutkan antara lain oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup. Sedangkan kegiatan yang dilarang yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Larangan untuk melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terhadap usaha di bidang teknologi informasi dapat berupa *Vertical Integration* yang dilakukan oleh para pihak yang berbentuk merger. Selain itu keberadaan B2b market place yang akan mendiskriminasi para pelaku usaha, karena sangat tergantung kepada kewenangan sistem yang diselenggarakan oleh market provider. Terakhir adalah pengambilan nama domain oleh kompetitor, yang berindikasi kepada penggunaan ataupun penguasaan suatu merek oleh kompetitor.

Tindakan *Tying Arrangement* dalam kasus *Microsoft* merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat, dimana perusahaan *software* raksasa *Microsoft* dituduh melakukan pelanggaran terhadap *antitrust law* dengan melakukan tindakan *Tying Arrangement* dengan mengaitkan pada produk *windows (the tying product)* dengan produk *browser internet explorer (the tied product)*. *Tying Arrangement* tersebut diduga dilakukan dalam rangka ingin memenangkan monopoli dalam pasar produk browser dalam internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad M. Ramli. 2004. *CyberLaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Utama. Bandung.
- Areeda, Phillip dan Kaplow, Louis. 1988. *Anti Trust, Problem, Text, Cases*. Little Brown and Company. Boston.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telekomunikasi*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Putri Regina, Muskibah, Faizah Bafadhal. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding dalam Perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal ZAAKEN*. Vol. 1 No. 1, 2020.
- Suhaimi, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia". *Jurnal Ius Civile*. Vol. 5 No. 1, 2021

B. Jurnal dan Internet

- Ardos Rewindo Sirait. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia". [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=persaingan+usaha+ tidak+ sehat](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=persaingan+usaha+tidak+sehat). Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Detikfinance. 2019. "Marketplace B2B Jadi Solusi Tepat Kembangkan Bisnis Berbagai Skala", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4529961/marketplace-b2b-jadi-solusi-tepat-kembangkan-bisnis-berbagai-skala>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
- Gresnews.com. 2016. "Hukum dan Praktik Monopoli dalam Persaingan Usaha". <https://www.gresnews.com/berita/tips/107859-hukum-dan-praktik-mono-poli-dalam-persaingan-usaha/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021.
- Hukum Online.com. 2019. "Ada Irisan Kuat Antara Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c93402f7d67/ada-irisan-kuat-antara-persaingan-usaha-dan-perlindungan-konsumen/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- JawaPos.com. 2019. "Inovasi Belum Maksimal (Bambang Minta Peneliti Belajar dari Kasus Google 'Versus' Netscape)", <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/03/2019/bambang-minta-peneliti-belajar-dari-kasus-google-versus-netscape/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
- Marwanto dan I Nyoman Mudana. 2018. "Pola Pengaturan Lembaga Kepailitan Dalam Upaya Mengantisipasi Persaingan Usaha Tidak Sehat". Bahan Kuliah. Bagian Hukum Keperdataan. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 2018, <https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=Kompetisi+dalam+berusaha/>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021.
- Mohan Rifqo Virhani. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain Di Internet". <https://media.neliti.com/media/publications/233761-analisis-perlindungan-hukum-terhadap-nama-270a1eb6.pdf>. Diakses pada Tanggal 10 Mei 2021.
- Muliyawan. 2015. "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum", Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

Ranyta Yusran. 2010. "Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/penting-nya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

Tokopedia.com. <https://www.tokopedia.com/aplikasion/new-produk-program-software-menggabungkan-memisahkan-pdf-merge-dan>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

.